

KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM MEMBANTU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Auliya Shalha Nasution¹, Mahirah Marwa Syaharani², Revi Prastanti³,
Yara Az-Zahra Hasibuan⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: aulyashalha@gmail.com¹, mahiramarwahs@gmail.com², r.prastanti933@gmail.com³,
Yaraaszahra06@gmail.com⁴

Abstract

Cash (BLT) is a significant policy instrument in efforts to reduce poverty and improve community welfare. This article's research method uses the literature study method, namely the process of collecting data from written sources, such as books and journals, to understand theories relevant to the research topic. The aim of the research is to evaluate the impact of BLT on recipient communities and examine the key aspects that influence its effectiveness. Apart from that, this article also discusses the meaning of direct cash assistance, several criteria for those who can receive BLT, the objectives of providing BLT, the advantages and disadvantages of BLT, and also the background to the implementation of BLT (Direct Cash Assistance).

Keywords: Assistance, Poverty, and Society

Abstrak

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan instrumen kebijakan yang signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode Penelitian artikel ini menggunakan metode studi literatur yaitu proses pengumpulan data dari sumber tertulis, seperti buku dan jurnal, untuk memahami teori yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi akibat dari BLT pada masyarakat penerima dan mencermati aspek-aspek kunci yang memengaruhi efektivitasnya, Selain itu artikel ini juga membahas pengertian dari bantuan langsung tunai, beberapa kriteria yang dapat menerima BLT, tujuan-tujuan pemberian BLT, kelebihan dan kekurangan BLT, dan juga latar belakang pelaksanaan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Kata Kunci: Bantuan, Kemiskinan, dan Masyarakat

Article history

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagiarism checker no
871.884.825

Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan pancasila dan UUD tahun 1945. Dan hal tersebut merupakan acuan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pedoman serta acuan tersebut dapat bertujuan untuk NKRI pada umumnya adalah untuk mewujudkan serta menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyatnya. Yang dapat menjadi tolak ukur dalam mencapai tujuan adalah dapat membuktikan bahwa suatu Negara harus rakyatnya memiliki sejahtera supaya negara tersebut menciptakan rakyat yang cerdas, adil dalam bernegara, memiliki kemakmuran, dan juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Tidak hanya berdasarkan kesejahteraan

materi yang dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan negara, tetapi harus memiliki kualitas kesehatan penduduk dan itu merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus dan wajib diperhatikan oleh setiap lembaga pemerintah (Trifena, 2020).

Kemiskinan termasuk masalah utama negara yang sedang membangun, termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan serius, dan kreatif.

Selain itu, tujuan pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan melalui pelaksanaan program pembangunan nasional, yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan setara dalam aspek material dan spiritual, dan untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui pengaturan perekonomian. Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang meletakkan dasar bagi fungsi dan keberpihakan negara dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kesejahteraan rakyat.

Bantuan Langsung Tunai atau yang biasa disebut dengan BLT adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian uang tunai bagi masyarakat miskin. Kemiskinan memiliki arti bahwa seseorang yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, papan dan kesehatan secara layak dimana penetapan garis kemiskinan berdasarkan tingkat perekonomian (Abdi, 2019). Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial, program ini berfokus pada penyaluran dana tunai, baik dengan syarat tertentu maupun tanpa syarat, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin. Dalam implementasinya, penentuan penerima bantuan harus berdasarkan kriteria yang objektif dan akurat, sehingga sistem pendukung keputusan (SPK) menjadi penting untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Ada banyak jenis program pemerintah Indonesia dari berbagai bidang untuk menuntaskan kemiskinan.

Program Bantuan Pemerintah terbagi atas Individu, keluarga, dan kelompok kurang mampu dalam berbagai bidang diantaranya : bidang Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Energi, Sosial dan Ekonomi, Perumahan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam situasi sulit seperti krisis ekonomi atau bencana. Bantuan Langsung Tunai (BLT) didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- Edi Suharto: BLT adalah skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok rentan untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan tertentu, bertujuan membantu masyarakat miskin menghadapi kesulitan ekonomi.
- Peraturan Menteri Keuangan: BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai langsung kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, diatur dalam peraturan yang menjelaskan mekanisme dan sasaran penerima.

Program ini dapat bersifat bersyarat atau tidak bersyarat (unconditional) dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. BLT pertama kali diperkenalkan di Brasil dan kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang melaksanakan program ini sejak tahun 2005. BLT berganti nama dari Bolsa Escola menjadi Bolsa Familia pada tahun 2000an setelah dimulainya pada tahun 1990an di Brazil. Tidak ada program lain di dunia yang memberikan bantuan keuangan langsung bersyarat sebanyak program ini. Ada dua jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT): tanpa syarat dan bersyarat.

1. BLT Bersyarat: Dikenal juga sebagai Conditional Cash Transfer (CCT), program ini mensyaratkan penerima untuk memenuhi kriteria tertentu, seperti menyekolahkan anak atau melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Contoh di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang fokus pada keluarga miskin dengan anak-anak.
2. BLT Tak Bersyarat: Juga disebut Unconditional Cash Transfer (UCT), program ini memberikan bantuan tanpa syarat tertentu. Penerima hanya perlu memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin. Contohnya adalah BLT yang diberikan selama krisis ekonomi, tanpa kewajiban tambahan bagi penerima

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode penelitian studi literatur adalah proses pengumpulan data dari sumber tertulis, seperti buku dan jurnal, untuk memahami teori yang relevan dengan topik penelitian. Ciri-ciri utamanya meliputi penggunaan data sekunder, interaksi langsung dengan teks, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Prosesnya mencakup tiga tahap yaitu menentukan jenis pustaka yang dibutuhkan, mengkaji dan mengumpulkan informasi, serta menyajikan hasil kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instruksi yang dikeluarkan oleh presiden pada tahun 2005 dan 2008, masing-masing mengenai "pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga miskin" dan "pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran", menandai dimulainya program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah menawarkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah pembayaran tunai tanpa syarat dan bersyarat serta berbagai jenis bantuan. Mengingat semua peristiwa yang telah terjadi dalam skala nasional dan internasional, termasuk pandemi COVID-19, hasil yang diharapkan dari strategi program ini adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Masyarakat miskin yang terdaftar dalam program bantuan sosial adalah penerima bantuan langsung tunai (BLT). Prosedur standar untuk melaksanakan program BLT di Indonesia terdiri dari langkah-langkah berikut: aklimatisasi, verifikasi data untuk mengidentifikasi penerima, distribusi kartu, distribusi dana, pelaporan dan penilaian. Kebijakan pemerintah menentukan secara spesifik program BLT, termasuk struktur dan jumlah dana yang diberikan. Inisiatif ini telah memicu diskusi dan kritik, meskipun dianggap efektif oleh beberapa pihak.

BLT bersyarat atau tanpa syarat dimungkinkan. Penerima harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan bantuan, seperti memastikan bahwa anak-anaknya bersekolah atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Jika bantuan tersebut tidak bersyarat, maka tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima. Bantuan tunai atau bentuk bantuan lainnya, seperti bantuan untuk kebutuhan dasar atau perawatan kesehatan, dapat dianggap sebagai BLT. Calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI): Penerima harus memiliki KTP sebagai bukti identitas.
2. Terdaftar di Basis Data Terpadu: Calon penerima harus tercatat dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Lain: Penerima tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lainnya untuk menghindari tumpang tindih.

4. Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, TNI, atau Karyawan BUMD/BUMN: Program ini ditujukan untuk masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau karyawan pemerintah.

Tujuan-tujuan pemberian BLT yaitu sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
3. Membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin.
5. Menggerakkan roda perekonomian.

Sasaran dan kelompok masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat bervariasi mengikuti kebijakan pemerintah. Berikut merupakan beberapa sasaran dan kelompok masyarakat yang berhak menerima BLT diantaranya yaitu :

1. Pertama dan terpenting, BLT Dana Desa membantu keluarga berpenghasilan rendah dan keluarga kurang mampu.
2. Masyarakat di pedesaan yang masih membutuhkan bantuan keuangan, seperti mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19
3. Individu dengan penyakit kronis dalam keluarganya dan mereka yang belum dipertimbangkan untuk mendapatkan bentuk dukungan sosial lainnya.
4. Masyarakat miskin terkena dampak COVID-19
5. Masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan bantuan sosial supaya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat tetap seimbang
6. Keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa.
7. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani
8. Masyarakat sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan dan juga untuk memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi
9. Masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi dan terdaftar dalam program bantuan sosial.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki kelebihan serta kekurangan dibandingkan dengan pendekatan bantuan sosial lainnya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan BLT dibandingkan dengan pendekatan lain:

Kelebihan BLT :

1. Tepat sasaran: BLT dapat tepat sasaran karena penerima bantuan telah ditentukan melalui pendataan yang akurat dan valid
2. Fleksibel: BLT dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, dan pendidikan.
3. Efektif: BLT dapat memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh penerima bantuan.

Kekurangan BLT :

1. Potensi penyalahgunaan: BLT dapat mengalami penyalahgunaan jika tidak diimplementasikan dengan baik.
2. Tidak berkelanjutan: BLT tidak memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan.

3. Tidak mendorong produktivitas: BLT tidak mendorong penerima bantuan untuk meningkatkan produktivitas dan mencari penghasilan tambahan.

Peraturan perundangan yang bersifat deskriptif operasional dan analisis kondisional yang bersifat deskriptif memberikan landasan program bagi pelaksanaan BLT secara sistematis di tingkat nasional. Sebuah program yang berkembang dari keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Protes terhadap kebijakan BLT pemerintah terdengar di tingkat nasional dan regional, baik dari kalangan mahasiswa, pemerintah daerah, maupun kelompok-kelompok masyarakat.

Namun, isu-isu dan kontroversi baru muncul seputar program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang memberikan kompensasi kepada keluarga-keluarga berpenghasilan rendah atas hilangnya subsidi bahan bakar. Banyak isu yang muncul, seperti kurangnya konsensus di antara berbagai lembaga pemerintah, media, dan masyarakat, karena adanya kesan tergesa-gesa dan pemaksaan dalam kebijakan BLT dan waktu yang relatif singkat untuk beralih dari penerbitan payung hukum ke implementasi. Bantuan Tunai Langsung (BTL), Dana Kompensasi BBM (DKM), dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) adalah beberapa namanya (Dharmawan 2008), dan sosialisasi yang kurang gencar dari pemerintah atas inisiatif ini terlihat jelas di sini. Sementara masyarakat yang mampu-atau lebih tepatnya pencari nafkah-memiliki penghasilan bulanan yang terjamin, sebagian masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan ini karena tidak terdaftar sebagai penerima. Masalah utama yang menjadi perhatian adalah masalah pendataan. Mayoritas penduduk setempat tidak mengetahui tanggal pendataan atau persyaratan khusus bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan BLT. Selain itu, sebagian penduduk tidak terdaftar di tempat tinggal dan tempat kerja karena mereka bekerja di luar wilayah domisili mereka, seperti yang tercantum dalam surat keterangan domisili, sehingga mereka yang benar-benar hidup dalam kemiskinan tidak terdata karena pengumpulan data yang tidak memadai. Penggunaan teknik BLT membutuhkan data yang dapat dipercaya, yang tidak dimiliki Indonesia karena infrastruktur informasi yang belum memadai. Para pengumpul data tidak memenuhi standar yang disyaratkan, sehingga data RTS (rumah tangga sasaran) menjadi tidak akurat (setidaknya 9 dari 14 persyaratan penerima BLT tidak terpenuhi). Kesalahan dalam mengalokasikan uang BLT yang disebabkan oleh mereka yang tidak mendapatkannya disebabkan oleh data yang tidak valid. Pendataan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pada saat pelaksanaan BLT, informasi yang akurat mengenai jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang berhak menerima BLT dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, standar hidup masyarakat dapat berfluktuasi sesuai dengan perkembangan ekonomi. Orang-orang yang seharusnya masuk dalam daftar RTS (Rumah Tangga Sasaran) tidak mendapatkan bantuan, sehingga sebagian masyarakat miskin merasa kecewa. Kondisi kehidupan penduduk dapat berubah sewaktu-waktu akibat perkembangan ekonomi, sehingga perlu dilakukan pendataan setiap periode agar pada saat BLT dilaksanakan dapat diperoleh data yang kredibel mengenai jumlah penduduk miskin yang berhak menerimanya.

Prioritas masyarakat termiskin menunjukkan bagaimana BLT mempengaruhi kesejahteraan mereka; makanan merupakan prioritas utama dalam membelanjakan uang BLT. Karena pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi tujuan utama BLT, hal ini menunjukkan bahwa BLT telah gagal memenuhi kebutuhan masyarakat miskin secara efektif. Namun, BLT memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin, khususnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, masyarakat miskin tidak dapat bertahan hidup hanya dengan mengandalkan BLT, sehingga BLT tidak berpengaruh terhadap

kinerja mereka. Di satu sisi, masyarakat miskin dapat mengambil manfaat dari kebijakan BLT ini.

Dana “gratis” dari pemerintah tidak akan menutupi kenaikan biaya hidup yang disebabkan oleh dampak BLT terhadap biaya langsung bahan bakar minyak dan dampak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Meskipun demikian, kebijakan BLT memiliki dampak buruk terhadap moral dan perilaku masyarakat.

Kritik terhadap program ini mencakup klaim-klaim kecurangan dalam distribusi bantuan, penerima yang tidak benar-benar membutuhkan uang, dan persyaratan yang tidak jelas. Di sisi lain, pihak lain menyatakan bahwa program BLT dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama di masa-masa sulit seperti wabah COVID-19 ini.

Terlepas dari kenyataan bahwa individu-individu berpenghasilan rendah tertentu seharusnya tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, masih ada populasi yang cukup besar yang belum pernah mendapatkannya atau tidak pernah mengajukan permohonan.

Keluhan umum lainnya yang diajukan terhadap Bantuan Langsung Tunai adalah bahwa bantuan tersebut tidak didistribusikan secara efisien atau mungkin disalahgunakan. Di antara banyak keluhan yang dilontarkan terhadap BLT adalah bahwa BLT gagal memenuhi kebutuhan masyarakat miskin secara memadai, tidak cukup transparan untuk dianggap berjalan dengan baik, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau penerima yang dituju. Hal ini menunjukkan adanya potensi hambatan terhadap pencapaian tujuan program yang mungkin dihadapi oleh distribusi BLT.

Meskipun demikian, BLT masih banyak dikritik dan memiliki beberapa kelemahan. Sumber-sumber yang ditemukan menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat miskin dalam pendidikan. Program PATH untuk Keluarga: Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan tunai dari PKH memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi pendidikan keluarga penerima manfaat PKH, yang menunjukkan bahwa bantuan tunai dapat membantu akses dan partisipasi pendidikan masyarakat miskin.

Saat ini, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Medan dan Sumatera Utara berlangsung serentak sejak 6 Januari 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat rentan, dengan berbagai jenis bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang juga disalurkan. BLT diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan inflasi. Penyalurannya dilakukan melalui jalur resmi, termasuk bank dan pemerintah desa. BLT Dana Desa di Medan mulai disalurkan pada awal Januari 2025 dan berlangsung selama tiga bulan berturut-turut. Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima Rp600.000 per bulan.

Diharapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke depan akan lebih baik, lebih akurat, lebih transparan, lebih adil, dan sosialisasi BLT yang lebih baik. Semoga bantuan yang diprogramkan oleh pemerintah menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih merata.

KESIMPULAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi instrumen penting dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan berbagai studi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa BLT adalah alat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem BLT bisa berbeda-beda tergantung pada

kebijakan di setiap daerah. Dalam sejumlah kasus, BLT telah memberikan manfaat yang signifikan, termasuk dalam akses yang mudah terjangkau pada bidang Pendidikan. Ada yang merasa bahwa BLT bermasalah karena permasalahan distribusi yang tidak efektif, kemungkinan adanya perlindungan, dan kesulitan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, meskipun BLT merupakan program yang menjanjikan, kita perlu terus berupaya menjadikannya lebih baik dan memikirkan bagaimana hal ini dapat disesuaikan dengan gambaran besar kebijakan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratama Putra, M. A, Dirli, A. A., Andriani, W., & Raharja, R. M., (2023). Menggali Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dalam Membantu Masyarakat. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*. Vol 2(4).
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu*, 15(2).
- Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526.
- Akib, I., & Risfaisal, R. (2015). Bantuan langsung tunai. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2).